

**PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK
TINGKAT SEKOLAH DASAR DALAM MENINGKATKAN MUTU
SEKOLAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 20 TAHUN 2003**

(Studi Pada Kecamatan Medan Denai Kota Medan)

SKRIPSI

*Dijadikan Dalam Rangka Memenuhi
Tugas Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

SYAHRAN

NPM : 03 840 0082

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UN UK INGGAT SEKOLAH DASAR DALAM MENINGKAKAN MUTU SEKOLAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 (Studi Pada Kecamatan Medan Denai Kota Medan)

PENULIS :

NAMA : SYAHRAN
NIM : 03 840 0082
BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

ZAMZAMI, SH, MH.

DOSEN PEMBIMBING II

HJ. JAMILAH, SH, MH

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : ARIF, SH, MH.
2. SEKRETARIS : HJ. RAHMANIAR, SH, M.HUM.
3. PENGUJI I : ZAMZAMI, SH, MH.
4. PENGUJI II : HJ. JAMILAH, SH, MH.

TANDA TANGAN

OISETJUI OLEH :

KETUA BIDANG HRM ADM NEGARA
FAK. HUKUM - UMA

(ZAMZAMI, SH, MH.)

DEKAN
FAK. HUKUM - UMA

(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.)

ABSTRAKSI

PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK TINGKAT SEKOLAH DASAR DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 (Studi Pada Kecamatan Medan Denai Kota Medan)

**O L E H
SYAHRAN**

NPM : 03 840 0082

Hukum Administrasi Negara

Pembahasan skripsi ini adalah sekitar penerapan sistem penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada skop pendidikan formal yaitu Sekolah Dasar dengan membatasi wilayah penelitian pada Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Medan Denai adalah disebabkan luasnya lingkup penyaluran BOS yang meliputi seluruh Indonesia, dan pada keadaan ini penulis membatasi pada skop sampel yang cukup kecil, dalam kerangka mengetengahkan permasalahan BOS dihubungkan dengan Hukum Administrasi Negara.

Untuk membahas skripsi ini maka diketengahkan permasalahan tentang apakah penyaluran dana BOS di Kecamatan Medan Denai sudah mampu meningkatkan mutu sekolah dan masalah-masalah apa saja yang timbul dalam penyaluran BOS di Kecamatan Medan Denai.

Agar permasalahan sebagaimana diuraikan di atas dapat diteliti maka dilakukan penelitian yang dilakukan secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

Dari hasil penelitian tersebut maka diketahui penyaluran dana BOS di Kecamatan Medan Denai sudah mampu meningkatkan mutu sekolah. Hal ini dapat dilihat dari besaran nilai dana BOS yang diberikan kepada siswa. Dimana semua sekolah pada tingkat pendidikan dasar khususnya SD mendapatkan bantuan BOS dan pemberian dana Bos tersebut bervariasi sesuai dengan keberadaan dan keanekaragaman siswa yang terdapat di sebuah sekolah pendidikan dasar. Apabila dihubungkan dengan mutu sekolah maka keberadaan dana BOS pada dasarnya hanya berpengaruh secara tidak langsung terhadap mutu sekolah karena dana BOS tidak diperuntukkan bagi pengadaan sarana dan prasarana sekolah tetapi lebih berperan dalam meningkatkan peran siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar.

Masalah-masalah yang timbul dalam penyaluran BOS di Kecamatan Medan Denai meliputi : Kurangnya kerjasama antara sekolah dengan orang tua wali murid, orang tua dan wali murid tidak mengetahui nilai besaran dana yang diterima siswa melalui BOS, terjadinya penyalahgunaan jabatan oleh pelaku-pelaku penyaluran BOS serta kurang dipahami penyaluran dana BOS oleh sekolah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul **“PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK TINGKAT SEKOLAH DASAR DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 (Studi Pada Kecamatan Medan Denai Kota Medan)”**.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Administrasi Negara dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zamzami, SH. MH, selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis.
- Ibu Hj. Jamilah, SH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

- Seluruh unsur aparaturnya Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan Ibu Dra. Hj. Lisiana R, MM, selaku Kacabdis Medan Denai dimana penelitian dilakukan.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasib yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Alm. H. Muhammad dan Almh. Baiyah, demikian juga isteri tercinta (Murni Chaniago. SPd,) dan anak-anakku tersayang, Wahyudi Hardiansyah, Asria Ramadansyah, serta Mirza Abdillah, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan kita bersama.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2007

Penulis

SYAHRAN
NPM. 03 840 0082

DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS).....	11
A. Pengertian dan Tujuan BOS.....	11
B. Landasan Hukum BOS.....	14
C. Organisasi Pelaksana BOS	16
D. Sasaran Program.....	23
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PENDIDIKAN DASAR.....	24
A. Pengertian Pendidikan Dasar	24
B. Maksud dan Tujuan Pendidikan Dasar	29

C. Jenis dan Macam Pendidikan Dasar	32
D. Pendidikan Dasar dan Kaitannya Dengan Hukum Administrasi Negara.....	35
BAB IV. PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KECAMATAN MEDAN DENAI KOTA MEDAN	41
A. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Medan Denai Kota Medan.....	41
B. Sekolah-Sekolah Yang Berhak Mendapatkan Dana BOS	52
C. Mekanisme Penyaluran BOS di Tingkat SD.....	55
D. Penggunaan Dana BOS	61
E. Permasalahan Penyaluran BOS di Tingkat SD.....	63
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan menekan angka putus sekolah, sejak tahun 2001 sampai dengan bulan Juni 2005, Pemerintah mengalihkan sebagian dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk membantu murid dari keluarga kurang mampu melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dalam bentuk Bantuan Khusus Murid (BKM).

Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan adalah program pemerintah guna meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan terutama dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. PKPS-BBM Bidang Pendidikan untuk periode Bulan Juli-Desember 2005 berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/SDLB/MI/Safaiyah dan sekolah agama non Islam setara SD, serta SMP/SMPLB/MTs/Safaiyah dan sekolah non Islam setara SMP.

Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa “wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Berdasarkan kenyataan tersebut upaya-upaya yang secara maksimal harus dilakukan pemerintah dalam upaya memenuhi ketentuan isi Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, termasuk halnya dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui PKPS-BBM Bidang Pendidikan.

Sumber dana PKPS-BBM berasal dari APBN. Oleh karena itu ketentuan pelaksanaan keuangan yang meliputi penyaluran, pencairan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. Selain itu ada ketentuan teknis lain yang bersifat mempertegas dan memperjelas pelaksanaannya.

Pengelolaan PKPS-BBM bidang Pendidikan melibatkan berbagai unsur antara lain Tim Pusat, Tim Propinsi, Tim Kabupaten/Kota, Sekolah/ Madrasah/Salafiyah, lembaga Keuangan dan instansi terkait lainnya. Semua unsur tersebut memerlukan pemahaman yang sama guna menghindari timbulnya hambatan dalam pelaksanaannya.

Disparitas partisipasi sekolah di Indonesia masuk cukup tinggi antar kelompok masyarakat. Salah satu kesenjangan terbesar adalah antara partisipasi pendidikan penduduk kaya dan penduduk miskin. Sebagai gambaran, pada saat rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/MTs sebesar 81,08 persen, APK kelompok terkaya telah mencapai 99,51 persen, sementara APK kelompok

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
2. Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. *Buku Panduan Biaya Operasional Sekolah (BOS), & BOS Buku, Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan*, 2006.
3. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
4. M. Noor Syam, *Pengertian dan Hukum Dasar Pendidikan, Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*. Usaha Nasional, Surabaya, 2001.
5. Ngalm Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
6. Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan, Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*, Angkasa, Bandung, 2001.
7. Petunjuk Teknis Keuangan Bantuan Operasional Sekolah, *Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan*, Departemen Pendidikan Nasional. Departemen Agama. Jakarta, 2005.
8. Prajudi Admosoedirjo. *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
9. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah*, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, Jakarta, 2005.
10. S. Nasution, *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar & Mengajar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

11. Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
12. Yusak Burhanuddin, *Administrasi Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2004.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

